

**EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH
DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN CERENTI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017**

Oleh: Pesrianto

Email: *pesrianto1@gmail.com*

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S. IP, M. IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The study was background by the Interior Minister no. 114 in 2014 regulation on village development guidelines. Planning for village development in a long-term way includes the village's mid-term development plan that is then described in the form of an annual development plan or village RKP. The building of Sustainable Waterproofing and Infrastucrure at Tanjung Medan Village 2017 is find a discrepancy between the village RKP and the village APB on development. The formulation of the problem in this study is how the effectiveness of sustainable waterproofing and infrastructure at Tanjung Medan Village 2017.

The study aims to learn of the effectiveness of Sustainable waterproofing and infrastructure at Tanjung Meda village 2017. The research method used in this study is a qualitative approach with a descriptive study. The type of the research data is the primary and secondary data. The data collection techniques in this researchs are documenting and interviewing. The data analysis technique used is qualitative data analysis.

The results of this study show that the effectiveness of Sustainable waterproofing and infrastructure at Tanjung Medan is not effective because of the inadequate benefit of the program, the lack of socialization, the attainment of ill-suited gols, the failure of monitoring of the quality of execution and adaption to planing.

Keywords: Target accuracy , socialization, goals, program monitoring

PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat 9 : Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain :

1. Pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa
2. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
3. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup
6. Bidang pembinaan kemasyarakatan.
7. Bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana Desa menjelaskan bahwa Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Yang meliputi antara lain :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan : lingkungan

- pemukiman, transportasi, energi, dan informasi dan komunikasi.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk memenuhi kebutuhan : kesehatan masyarakat, dan pendidikan dan kebudayaan.
 3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk memenuhi kebutuhan : kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa lainnya, dan pelestarian lingkungan hidup.
 5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang wajib dilaksanakan paling lambat pada bulan juni tahun anggaran berjalan.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi : Rencana Jangka Menengah Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten//kota.

Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Tahunan desa atau RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Maksud penyusunan RKP Desa untuk menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Tabel 1.1 : Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Medan Bidang Pembangunan Tahun 2017

No	Jenis Kegiatan	Prakira Volume
1	Pengadaan Meubeller PAUD	1 Paket
2	Pagar Posyandu	1 Unit
3	Pembangunan Sumur Bersih	6 Unit
4	Perluasan Jalan Desa	1500 M
5	Pembangunan Semenisasi Jalan Desa	300 M
6	Pembangunan Pintu	1 Unit

	Air	
7	Pembuatan Kerambah Ikan	10 Paket

Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan, 2020

Dari tabel di atas diketahui beberapa rencana kerja pemerintah desa Tanjung Medan bidang pembangunan desa tahun 2017. Dalam hal ini penulis terfokus pada rencana pembangunan desa bidang pembangunan sumur air bersih, rencana kerja pemerintah desa kemudian dituangkan dalam APB Desa.

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, Visi dan Misi Desa, dan Rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk ke desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kegiatan Pembangunan desa Tanjung Medan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Desa Tanjung Medan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dijelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bidang Pembangunan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Medan Tahun Anggaran 2017 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Bidang Pembangunan	Anggaran	Sumber
1	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan	303.343.400,00	Dana Desa (APBN)

	Semenisasi Jalan		
2	Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumur Air Bersih	180.702.200,00	Dana Desa (APBN)
3	Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pagar POSKESDES	110.216.100,00	Dana Desa (APBN)

Sumber : APBDes Desa Tanjung Medan 2017

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Tanjung Medan menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan anggaran sebesar Rp. 180.702.200 dengan waktu pelaksanaan pembangunan ialah 120 hari dihitung sejak bulan Agustus sampai bulan Oktober 2017. Pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih di bangun sebanyak empat (4) unit dengan ukuran 4m x 3m yang terbagi di tiap dusun di desa Tanjung Medan, dengan pembagian diantaranya : satu unit dibangun di dusun I, dua unit dibangun di dusun II dan satu unit dibangun di dusun III.

Dari pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Tanjung Medan penulis menemukan fenomena adanya sarana dan prasarana yang tidak dimanfaatkan, sarana dan prasarana yang tidak terawat dan sebagian sudah tidak berfungsi, tidak adanya perubahan perilaku yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah pembangunan sarana dan prasarana air bersih masih adanya masyarakat yang menggunakan air

sungai kuantan yang sudah tercemar untuk keperluan sehari-hari.

Dari fenomena diatas, adapun permasalahan yang ditemukan yaitu ketidak sesuaian antara rencana kerja pemerintah desa tahun 2017 dan realisasi APB Desa tahun 2017 bidang pembangunan desa tanjung medan sehingga adanya indikasi bahwa pembangunan sarana dan prasarana air bersih belum optimal.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana efektivitas pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui Efektivitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat terkait sebagai informasi dan acuan dalam pengambilan kebijakan mengenai Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih.
- b. Manfaat Akademik, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas dan mengkaji persoalan sejenis dan diharapkan bermanfaat dalam memperkaya khasanah pengetahuan bagi akademis di lingkungan Ilmu Pemerintahan.

KERANGKA TEORI

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan erat dengan efisiensi.

Efisiensi digunakan untuk mengukur proses, sedangkan efektivitas berguna untuk mengukur keberhasilan mencapai tujuan. Khusus mengenai efektivitas pemerintahan, Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila pencapaian tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan. Disebut efektif apabila pencapaian tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan.

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program.

Menurut Pasalong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab dan akibat. Efektivitas dapat

dipandang sebagai suatu sebab dari variabel ini. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Tingkat Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang telah dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut Sedarmayanti efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran untuk menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan mencapai hasil dan manfaat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektif atau tidaknya suatu program itu dapat kita ukur dan kita lihat dari pencapaian tujuannya. Selain itu, sesuatu dapat dikatakan efektif apabila ada kesesuaian antara harapan atau rencana, implementasi dengan hasil yang telah dicapai.

Selanjutnya Makmur mengatakan bahwa kegiatan dilakukan secara efektif apabila dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampilkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Sedangkan kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang dicapai dikatakan tidak efektif.

Menurut Sondang dalam Hessel mengungkapkan beberapa hal yang menjadi kriteria dalam pengukuran efektivitas adalah :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat
5. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
6. Sistem pengawasan dan pengendalian mendidik

Menurut Sutrisno Mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh Efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat berdasarkan aspek-aspek antara lain : (1) Aspek tugas dan fungsi, yaitu lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas dan fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik; (2) Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana suatu kegiatan yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program tersebut dikatakan efektif; (3) Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan dengan pihak pelaksana program; (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program

kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut telah tercapai.

Pendapat lain, Budiani menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran Program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat disampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta pada khususnya.
3. Tujuan Program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan Program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian peserta program.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan ialah mengadakan, membuat, atau mengatur sesuatu yang belum ada. Pembangunan dilakukan untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat, dan bentuknya dapat berupa pembangunan fisik, serta pembangunan sosial ekonomi. Pembangunan dapat berskala lokal, regional, ataupun nasional. Pembangunan nasional meliputi seluruh wilayah negara dengan titik berat pada sektor perekonomian. Pembangunan lokal meliputi kawasan kecil dengan

penekanan pada keadaan fisik. Sementara itu, pembangunan regional meliputi suatu wilayah dan mempunyai tekanan utama pada perekonomian dan selanjutnya pada keadaan fisik.

Soetrisno mengemukakan bahwa : pada pokoknya pembangunan merupakan suatu perubahan sosial. Dalam proses ini, perubahan tidak hanya diharapkan terjadi pada tahap kehidupan masyarakat tetapi juga peranan dari unsur-unsur yang terlibat dalam proses pembangunan, yaitu masyarakat dan negara.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan dan pertumbuhan yang direncanakan ke arah perbaikan yang lebih modernitas, pembinaan bangsa dan kemajuan sosial ekonomi (Syamsi).

Konteks pembangunan desa yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Tjenreng) mengandung tiga makna penting, yaitu : (a) Pembangunan desa sebagai perpaduan kegiatan masyarakat dengan pemerintah; (b) Bidang pembangunan desa adalah peningkatan kondisi masyarakat di bidang sosial ekonomi dan budaya; (c) Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan nasional.

Di Indonesia, pembangunan desa diidentifikasi sebagai seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di perdesaan dan meliputi seluruh aspek dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat dan gotong royong (Tjenreng).

Dari perspektif yang luas, pembangunan desa adalah merupakan upaya perubahan sosial, yaitu merubah

suatu masyarakat tradisional menuju masyarakat maju. Perubahan yang diharapkan tidak hanya terbatas pada aspek kehidupan sosial, tetapi mencakup aspek psikologi yaitu perubahan sikap dan perilaku masyarakat sejalan dengan tuntutan perubahan/pembangunan.¹

Dengan demikian, pelaksanaan program-program pembangunan desa adalah merupakan upaya perubahan sosial yang bertujuan merubah seluruh aspek kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dengan sasaran pokok menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mubyartono dan Sartono Kartodirdjo, pembangunan perdesaan yang berorientasi kepada faktor manusia dikatakan berhasil, apabila² :

- 1) Ada peningkatan mutu kehidupan fisik setiap anggota masyarakat, yang antara lain mencakup mutu lingkungan fisik, pola konsumsi pada pemenuhan konsumsi fisik, dan rasa aman dari gangguan fisik.
- 2) Mampu meningkatkan secara terus-menerus jumlah penduduk yang semakin mudah memperoleh nafkah.
- 3) Meningkatkan bagian penduduk yang semakin mampu menentukan nasibnya sendiri, dan meneentukan hari depan anak-anaknya.
- 4) Mampu meningkatkan jumlah penduduk yang kesadaran lingkungannya semakin besar, mampu berusaha sendiri untuk

meningkatkan keterampilannya, meningkatkan solidaritas sosial anggota masyarakat.

- 5) Ada pertambahan jumlah penduduk yang semakin mampu ikut serta secara aktif dalam putusan-putusan (politik) yang menentukan nasib mereka.

Ndraha mengemukakan beberapa kriteria keberhasilan pembangunan desa sebagai berikut:

- 1) Masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan;
- 2) Adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan;
- 3) Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan/ditumbuhkembangkan.
- 4) Jika prasarana fisik dan;
- 5) Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara.

Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Menurut Jhon SW.Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Dalam Pendekatan Kualitatif data yang

¹ Ibid., hal 138

² Ibid., hal 147

dikumpulkan adalah data dalam bentuk narasi atau angka-angka (sensus, misalnya). Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif. Informan secara sengaja dipilih dengan pertimbangan mengetahui, berkompentensi, dan terlibat dengan topik penelitian. Adapun daftar informan penelitian ini adalah:

1. Sekretaris Desa Tanjung Medan M. Zen;
2. Ketua BPD Desa Tanjung Medan M. Neru;
3. Ketua LPM Desa Tanjung Medan;
4. Ketua TPK Asmawi;
5. Kepala Dusun, Jasben, Suparman dan Sabran
6. Masyarakat, Husan, Kasuma, Herman, Meci, Rail dan Hendri.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Wawancara adalah proses memperoleh informasi atau keterangan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan saling bertatap muka dengan informan. Peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada informan yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan mengenai permasalahan tentang pembangunan sarana dan prasarana penyediaan air bersih sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data atau informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti mengumpulkan dan meneliti data yang bersumber dari sejumlah dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun analisis data menggunakan Teknik analisis kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diperoleh dengan metode deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Data yang penulis peroleh dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif menurut teori dan kerangka berfikir lalu disajikan dalam bentuk uraian pembahasan mengenai Efektivitas Pembangunan sarana dan prasarana Air Bersih di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerentianalisis deskriptif kualitatif yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pembangunan Sarana dan Porasarana Air Bersih di Desa Tanjung Medan Tahun 2017

Efektivitas merupakan suatu unsur pokok untuk mengukur tingkat keberhasilan dari organisasi, kegiatan ataupun program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat diukur dengan membandingkan antara tujuan yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, jika hasil suatu organisasi, kegiatan atau program semakin mendekati tujuan

yang telah ditetapkan maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Tanjung Medan sejauh mana program pembangunan ini mencapai tujuannya yakni memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan sarana dan prasarana air bersih dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Untuk mengetahui efektivitas pembangunan sarana dan prasarana air bersih di desa Tanjung Medan dapat dilihat menggunakan indikator berikut :

a. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran pembangunan sarana dan prasarana air bersih bermaksud untuk melihat sejauh mana program ini dirasakan oleh masyarakat sasaran penerima manfaat. Setiap program yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun setiap organisasi tentu memiliki sasaran yang merupakan target dari program yang telah direncanakan. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan sehingga sasaran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan keberhasilan suatu program. Dalam pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Tanjung Medan sasaran program pembangunan adalah masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan masyarakat yang masih menggunakan air yang bersumber dari sungai kuantan.

Tabel 1.3 : Jumlah Masyarakat Kurang Mampu di Desa Tanjung Medan

No	Wilayah	KK
1	Dusun I	23

2	Dusun II	28
4	Dusun III	10
Jumlah		61

Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan, 2020

Dengan adanya program pembangunan sarana dan prasarana air bersih ini diharapkan selain memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat kurang mampu juga diharapkan mampu meningkatkan tingkat ekonomi dan kesehatan masyarakat desa tanjung medan pada umumnya. Sasaran program hendaknya harus benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada dilapangan.

Ketepatan sasaran program sangat penting dalam mencapai tujuan program dan berpengaruh terhadap keberlangsungan program. Pemilihan lokasi pembangunan sarana dan prasarana air bersih hendaknya juga harus sesuai dengan sasaran penerima manfaat program, semakin dekat pembangunan dengan sasaran penerima manfaat maka akan semakin efektif.

Tabel 1.4 : Pemilihan Penempatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Tanjung Medan berdasarkan dokumen RAB

No	Kawasan Pembangunan	Jumlah	Penempatan Pembangunan
1	Dusun I	1	Tanah Hibah Masyarakat
2	Dusun II	2	Mesjid dan Kantor Desa
3	Dusun III	1	Musholah
Jumlah		4	

Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan, 2020

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Tanjung berdasarkan dokumen rencana anggaran

biaya bidang pembangunan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih maka penempatan lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang telah ditetapkan ialah sarana dan prasarana di bagi atas tiap dusun yang ada di desa tanjung medan dengan rincian sebagai berikut : satu unit sarana dan prasarana dibangun di dusun I (tanah hibah masyarakat) dua unit berada di dusun II (kantor desa dan mesjid) satu unit di dusun III (musholah).

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih tidak sepenuhnya tepat dengan sasaran, dikarenakan keterbatasan lahan untuk pembangunan. Adapun masalah yang sering muncul dalam pembangunan yaitu masyarakat yang tergolong sebagai sasaran penerima manfaat program tidak memiliki lahan untuk pembangunan dan kurangnya minat masyarakat terhadap program pembangunan sehingga sebagian masyarakat tidak ingin menghibahkan tanah/lahannya secara sukarela untuk pembangunan ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam mensosialisasikan program pembangunan. Ketepatan sasaran program dapat dilihat dari pemilihan lokasi pembangunan.

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Tanjung Medan masih belum efektif dalam hal ketepatan sasaran program, penempatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang dilaksanakan tidak sesuai dengan sasaran penerima manfaat program dan tujuan pemanfaatan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari empat unit sarana dan prasarana yang dibangun tercatat hanya satu unit yang lokasi penempatannya sesuai dengan sasaran penerima manfaat program yaitu masyarakat

kurang mampu yang tidak memiliki sumber air bersih sendiri, ini tentunya menjadi faktor ketidak berhasilan program dalam mencapai tujuan.

b. Sosialisasi Program

Setiap program-program kebijakan dari pemerintah atau organisasi yang baru pasti akan dilakukan sosialisasi di masyarakat, seperti sosialisasi program pembangunan. Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program. Meskipun terlihat sepele dan sangat ringan, namun proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Pada prinsipnya sosialisasi dapat dilakukan kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun, tidak dibatasi waktu, tempat dan kepada siapa sosialisasi dilakukan. Oleh karena itu sosialisasi harus dilakukan dengan tepat dan benar karena hal tersebut merupakan langkah awal yang sangat menentukan pelaksanaan program.

Dalam hal ini, sosialisasi yaitu kemampuan pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai program pembangunan dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran penerima manfaat pada khususnya.

Dalam hal sosialisasi Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di desa tanjung medan, sosialisasi dilaksanakan sebaiknya langsung kepada masyarakat secara keseluruhan terutama sasaran penerima manfaat program. Bahan sosialisai bisa berupa penjelasan siapa sasaran penerima manfaat, tujuan pembangunan dan pemilihan lokasi pembangunan dan setiap aspek penting dalam pembangunan.

Proses sosialisasi dilakukan pemerintah desa hanya terjadi pada saat

proses musyawarah desa dilaksanakan. Selanjutnya pemerintah desa mengharapkan informasi mengenai pembangunan desa dapat disampaikan kepada masyarakat secara luas oleh pihak-pihak yang hadir pada saat musyawarah terutama kepala dusun agar dapat menyampaikan setiap rencana pembangunan kepada masyarakat dalam cakupan dusun melalui musyawarah tingkat dusun atau komunikasi sehari-hari yang biasa terjadi dalam bermasyarakat.

Perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan semua unsur pemerintahan desa dan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di desa tanjung medan dibahas melalui musyawarah penyusunan raancangan RKP Desa Tanjung Medan tahun 2017. Pada hari selasa, 13 Desember 2016.

Musyawarah rancangan rencana kerja pemerintah desa dihadiri oleh Kepala desa, perwakilan pemerintah kecamatan, sekretaris desa, kaur, BPD, LPM, kepala dusun, RT/RW, tokoh masyarakat, anggota PKK, perwakilan pemuda dan masyarakat.

8	RT/RW	3
9	LPM	1
10	PKK	3
11	Tokoh Masyarakat	2
12	Masyarakat	4
13	Pemuda	2
Jumlah		39

Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan, 2020

Sosialisasi program pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Tanjung Medan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tanjung Medan tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang akan dilaksanakannya, tidak adanya keterlibatan masyarakat sebagai sasaran penerima manfaat program dalam musyawarah pembangunan, kurangnya minat masyarakat terhadap pembangun juga menjadi bukti kegagalan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ini juga disebabkan karena tidak adanya dukungan sosialisasi lanjutan oleh pemerintahan desa baik berupa lisan atau pun media elektronik dan media sosial berupa visual ataupun audio visual setelah musyawarah desa dilaksanakan.

c. Tujuan Program

Yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam waktu tertentu. Efektivitas program dapat dilihat dari tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika hasil suatu program semakin dekat dengan tujuan program yang telah ditetapkan, maka program dapat dikatakan semakin efektif.

Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih memiliki tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu akan kebutuhan air bersih. Manfaat

Tabel 1.5 : Daftar Hadir Musyawarah Desa Pembahasan RKP Desa tahun 2017

No	Nama	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Kecamatan	1
3	TA	1
4	Sekretaris Desa	1
5	Kaur	2
6	BPD	5
7	Kepala Dusun	3

pembangunan sarana dan prasarana air bersih dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Tabel 1.6 : Tujuan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana air Bersih di Desa Tanjung Medan

No	Uraian Pemanfaatan	Pemanfaat	
		LK	PR
1	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	200	150
2	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	300	400
Jumlah		500	550

Sumber : Kantor Desa Tanjung Medan, 2020

Pembangunan sarana dan prasarana air di bersih desa tanjung medan belum mencapai tujuan program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya yakni memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dengan pemanfaatan untuk meningkatkan kesehatan dan ekonomi masyarakat dengan jumlah pemanfaat sebanyak 1050 orang.. Pencapaian tujuan dapat dipengaruhi oleh jumlah sarana dan prasarana yang dibangun dapat mencukupi atau sebaliknya, pembangunan sarana dan prasarana air bersih dalam usulan RKP Desa berjumlah sebanyak 6 unit dan realisasi pembangunan iyalah sebanyak 4 unit.

Ketidak berhasilan pembangunan dalam mencapai tujuan disebabkan juga oleh tidak baiknya kualitas pembangunan yang dilaksanakan, adanya sarana dan prasarana yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat disebabkan oleh kualitas air dari sarana dan prasarana yang tidak bagus, lokasi sarana dan prasarana yang tidak terjangkau, ketidak tepatan sasaran program, sarana dan prasarana yang tidak terawat menjadi faktor ketidak berhasilan program pembangun dan ketidak berlanjutan program.

d. Pemantauan Program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian peserta terhadap program. Hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di desa tanjung medan diketahui telah sesuai dengan ketentuan rencana pembangunan.

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di desa tanjung medan menggunakan dana desa yang bersumber dari APBN dengan anggaran sebesar Rp. 180.702.200, pembangunan sarana dan prasarana air bersih dibangun sebanyak Empat (4) Unit dengan ukuran 4m x 3m yang masing-masing terbagi ditiap dusun yang ada di desa tanjung medan. Waktu Pelaksanaan pembangunan adalah 120 hari terhitung sejak bulan agustus sampai bulan oktober 2017.

Kondisi sarana dan prasarana air bersih di Desa Tanjung Medan sudah tidak terawat dan mengalami kerusakan ini disebabkan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang ada. Sarana dan prasaraana yang sudah tidak dimanfaatkan oleh masyarakat disebabkan karena kualitas air yang tidak baik, sarana dan prasarana yang sudah rusak, biaya pemanfaatan yang digunakan untuk listrik yang menimbulkan masalah baru dengan sesama pemanfaat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemantauan program sarana dan prasarana air bersih di desa tanjung medan tidak terlaksana, tidak ada evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan program pembangunan baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa terhadap sarana dan

prasarana yang sudah rusak dan sarana dan prasarana yang tidak dimanfaatkan lagi. Ini menyebabkan kurang efektifnya pemanfaatan pembangunan tersebut sehingga tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa seharusnya mampu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam hal pemanfaatan, perawatan dan pengelolaan sarana dan prasarana agar tetap terlaksana keberlanjutan program pembangunan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang efektivitas pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017, dari empat indikator yang digunakan diantaranya yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana air bersih di desa tanjung medan tidak efektif.

Dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih terjadi ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program, ini dapat dilihat dari pemilihan lokasi pembangunan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat pembangunan program yang telah ditetapkan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan, pencapaian tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak terjadinya pemantauan program baik oleh pemerintah desa serta tidak adanya kesadaran dari masyarakat pemanfaat program dalam pembentukan struktur pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dalam upaya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian

terhadap perencanaan dalam mencapai tujuan pembangunan.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan temuan dalam penelitian ini khususnya kepada Pemerintahan Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa selaku pemegang kekuasaan tingkat desa harus bijak dan lebih matang lagi dalam menentukan kebijakan pembangunan desa supaya tercapai ketepatan sasaran dan tujuan program pembangunan.
- b. Pemerintah desa diharapkan mampu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam hal pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pembangunan agar tetap terlaksana keberlanjutan program pembangunan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Banga, Wemby. 2018. *Kajian Administrasi Publik Kontemporer*. Yogyakarta : Gava Media
- Eko, Sutoro. 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta : APMD Press
- Handoko, T. Hani. 2001. *Manajemen II*. Yogyakarta : BPFE
- Harbaini Pasalong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana

Iskandar, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press

Jayadinata, Johara & Pramandika. 2006. *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*. Bandung : ITB

Makmur, 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : Reflika Adimata

Musaroh. 2010. *Aspek-aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Universitas Brawijaya Malang

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : CV Mandar Maju

Strauss, Anselem & Corbin Juliet. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung : Alfabeta

Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta : Kencana

Usman, Husaain. 2009. *Metode Penelitian Social*. Jakarta : Edisi Kedua Bumi Aksara

Wasistiono, Sardu & Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : CV Fokusmedia

Jurnal :
Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan*

Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT. Volume 2 No. 1

Melani Rampengan, dkk. 2016. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No. 03

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun